

Determinan atas Opini Laporan Hasil Pemeriksaan Survey pada Pemerintah Daerah Periode 2019-2022

Muhammad Taofik Ismail^{1,*}, Erik Nugraha², Dicky Aditya Ramadhan²

¹ Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Sangga Buana

Jl. PHH Mustopa No. 68, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat (40124), Indonesia

² Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Sangga Buana, Kota Bandung, Indonesia

Jl. PHH Mustopa No. 68, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat (40124), Indonesia

Email: ^{1,*}muhammad.taofik@usbypkp.ac.id, ²erik.nugraha@usbypkp.ac.id, ³dicky.aditya@usbypkp.ac.id

Email Penulis Korespondensi: muhammad.taofik@usbypkp.ac.id

Submitted: 25/03/2025; Accepted: 30/03/2025; Published: 31/03/2025

Abstrak—Abstrak Salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Bentuk pengendalian terhadap otonomi daerah dalam bidang keuangan adalah adanya pemeriksaan atas pengelolaan keuangan oleh BPK dalam bentuk opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan peran aktif masyarakat dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan daerahnya sehingga tercipta kualitas laporan keuangan akuntabel dengan memperoleh opini yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesejahteraan masyarakat yang diukur oleh indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan tingkat kesenjangan pendapatan terhadap kualitas opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang terdiri dari 112 opini pemeriksaan pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat periode 2019-2022. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan indeks pembangunan manusia dan tingkat kesenjangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Opini Audit; Pemerintah Daerah; Teori Keagenan; Indeks Pembangunan Manusia; Produk Domestik Regional Bruto; Tingkat Kesenjangan Pendapatan

Abstract—One of the goals of the Indonesian state is to promote general welfare. With regional autonomy, it is hoped that local governments will have authority and independence in realizing the welfare of their people. The form of control over regional autonomy in the financial sector is an audit of financial management by the BPK in the form of an opinion on the audit of local government financial statements. The realization of community welfare can create an active role of the community in the process of supervising their regional financial management so that the quality of accountable financial reports is created by obtaining good opinions. This study aims to determine the influence of community welfare as measured by the human development index, gross regional domestic product, and income gap level on the quality of opinions on local government financial statements using quantitative methods. The data collected is secondary data consisting of 112 audit opinions on local governments in the West Java region for the 2019-2022 period. The hypothesis in this research was tested using panel data regression analysis. The results of the test showed that the gross regional domestic product had an effect on the opinion of the results of the audit of the financial statements of the local governments, while the human development index and the level of income gap had no effect on the opinion of the results of the audit of the financial statements of the local governments.

Keywords: Audit Opinion; Local Government; Agency Theory; Human Development Index; Gross Regional Domestic Product; Income Gap Level

1. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pengendalian dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya dibidang keuangan daerah, pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu pemerintah juga menerbitkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menandai adanya reformasi dibidang keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK salah satunya adalah pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah terdiri dari empat jenis pernyataan opini yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan pernyataan menolak memberikan opini, hal ini tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2004. Opini atas pemeriksaan keuangan merupakan kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang diberikan secara profesional oleh pemeriksa.

BPK memberikan opini sebagai bentuk apresiasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan disamping rekomendasi lainnya yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan. Di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki total 28 entitas pemeriksaan pada tahun anggaran 2022 terdapat 13 (46,43%) Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP, 10 (35,71%) Pemerintah Daerah mendapatkan opini WDP dengan paragraf penekanan suatu hal, dan 5 (17,86%) Pemerintah Daerah mendapatkan opini WDP. Pemeriksaan menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui

tingkat akuntabilitas, yaitu sejauh mana ketepatan dan kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperiksa oleh BPK untuk dapat mengukur akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan tersebut dan hasilnya BPK memberikan opini atas LKPD yang didasarkan dari hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK bisa dijadikan proses awal terciptanya akuntabilitas secara penuh oleh Pemerintah Daerah. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah sangat penting, sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999, peran serta masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Dari hal tersebut dapat dijadikan dasar bahwa masyarakat merupakan salah satu kunci dalam fungsi pengawasan demi terciptanya pengelolaan anggaran yang baik dan didukung oleh keterbukaan informasi yang baik. Menurut perspektif keagenan, masyarakat sebagai principal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk mengelola sumber daya dan pelayanan publik. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat akan mendapatkan pengawasan penuh dari masyarakat. Pengawasan tersebut tidak akan terjadi jika terdapat konflik kepentingan antara principal dan agen, karena adanya konflik yang menimbulkan asimetri informasi sehingga masyarakat menjadi sulit mengetahui dan melakukan pengawasan pada pemerintahnya dalam menggunakan kewenangan yang sesuai dengan harapan. Tingkat ekonomi, ukuran populasi pemda, budaya politik masyarakat setempat merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam konflik principal agent (Hamada & Mahaswara, 2016). Sementara itu menurut Rajkumar & Swaroop, (2008) menyatakan bahwa peran pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan merupakan kunci terciptanya good governance sehingga peran aktif dan partisipasi masyarakat akan meningkat dalam mengawasi pemerintahannya.

Tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan merupakan dimensi dasar yang digunakan badan pusat statistik (BPS) dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks yang ditetapkan oleh UNDP pada tahun 1996 untuk mengukur kesejahteraan masyarakat (Bhakti et al., 2012). Selain IPM tercapainya kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Angka kesejahteraan akan mengalami penurunan jika laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Provinsi Jawa Barat seperti dikutip dalam jabarprov.go.id tercatat menjadi Provinsi dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Pulau Jawa (diatas DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, dan tertinggi ketujuh secara nasional. Salah satu indikatornya adalah persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 7,62%, menurun 0,36% terhadap September 2022 dan turun sebesar 0,44 persen poin terhadap Maret 2022. Peninjauan kepada penelitian sejenis diperlukan agar menghasilkan penelitian yang baik dan dapat bermanfaat kepada semua pihak. Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang kesejahteraan masyarakat terhadap opini audit laporan keuangan daerah.

Tabel 1. Penelitian Sejenis yang Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Efendi & Komarudin, 2014)	Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Dan Stabilitas Politik Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Hasil penelitian ini menunjukan semakin tinggi tingkat kompetisi politik maka kualitas opini LKPD akan semakin turun. Sedangkan saat jangka waktu pemilukada semakin dekat, kepala daerah akan berusaha untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, sehingga kualitas opini LKPD akan semakin baik.	Meneliti Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat (IPM) terhadap Opini audit LKPD	Meneliti Pengaruh Komptesisi Politik dan Jangka Waktu Pemilukada terhadap Opini audit LKPD
2	(Adzani & Martani, 2014)	Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik Dan Ketidakpatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti dan jangka waktu pemilihan kepala daerah memiliki dampak negative terhadap opini audit. Disisi lain, pembangunan manusia memiliki dampak yang	Meneliti pengaruh IPM dan Tingkat Pendapatan Masyarakat terhadap Opini Audit LKPD	Meneliti tingkat pengetahuan masyarakat, Kesehatan masyarakat, Jangka waktu dengan pemilu, Politik Dinasti, Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	(Istiyanto, 2016a)	Kerugian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Dan Opini Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia	positif terhadap opini audit pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai kerugian daerah berpengaruh signifikan terhadap opini pemeriksaan atas LKPD sedangkan jumlah temuan kerugian daerah, IPM, PDRB per kapita, dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan tidak berpengaruh terhadap opini pemeriksaan atas LKPD	Meneliti Pengaruh IPM, PDRB per Kapita, dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan terhadap Opini LKPD	dengan Opini Audit LKPD Meneliti Pengaruh Jumlah dan Nilai Kerugian Daerah terhadap Opini LKPD di Indonesia
4	(Surya & Suparno, 2019a)	Pengaruh Peran Masyarakat Madani dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)	Hasil dari penelitian ini adalah: IPM, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan SPI bersama-sama berpengaruh terhadap opini LK pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. IPM, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan SPI secara parsial berpengaruh terhadap opini LK pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh	Meneliti pengaruh IPM, tingkat pendapatan, terhadap opini	Meneliti tingkat pendidikan dan SPI terhadap opini pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh

Kebaharuan dalam penelitian yang dilakukan terdapat pada variabel penelitiannya yaitu adanya variabel tingkat kesenjangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas secara lebih detail mengenai tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap opini atas hasil pemeriksaan LKPD.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Masyarakat

Menurut Taneko, (1984) menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan yang obyektif dan mandiri yang tidak terpengaruh oleh anggota-anggotanya. Simanjuntak, (2016) menyatakan bahwa hubungan satu sama lain baik perorangan atau kelompok untuk mencapai kepentingan bersama atau yang bertentangan dalam suatu ruang, peristiwa, waktu dan tempat oleh kumpulan manusia adalah pengertian dari masyarakat. Pendapat dari Saebani, (2012) yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah atau jaringan relasi sosial. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama Koentjaraningrat, (2009). Didasarkan pada beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama-sama di wilayah tertentu, bergaul, memiliki kebudayaan, membagi pekerjaan selama waktu yang relatif lama, tergantung satu sama lain (interdependent), memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan anggota, dan memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki.

2.2. Agency Theory

Hubungan keagenan menurut Jensen dan Meckling dalam (Efendi & Komarudin, 2014) kontrak dimana satu orang atau lebih pemilik (*principal*) terlibat dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Davis, Schoorman, dan Donaldson dalam (Adzani & Martani, 2014) hubungan keagenan terjadi akibat pihak pemilik (*principal*) memberikan sebagian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada pihak lain (*agent*). *Agency Theory* dapat menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak,

baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal (Mardiasmo, 2021). Kontrak yang dimaksud disini adalah pendelegasian wewenang kepada agent untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat akan mendapatkan pengawasan penuh dari masyarakat. Pengawasan tersebut tidak akan terjadi jika terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, karena adanya konflik yang menimbulkan asimetri informasi sehingga masyarakat menjadi sulit mengetahui dan melakukan pengawasan pada pemerintahnya dalam menggunakan kewenangan yang sesuai dengan harapan. Menurut (Treisman, 2000) faktor dalam konflik principal agent yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tata kelola keuangan dan *good public governance* yaitu, tingkat ekonomi, ukuran populasi pemerintah daerah, dan budaya politik masyarakat setempat. Sementara itu menurut (Rajkumar & Swaroop, 2008) menyatakan bahwa peran pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan merupakan kunci terciptanya *good governance* sehingga peran aktif dan partisipasi masyarakat akan meningkat dalam mengawasi pemerintahannya.

2.3. Good Governance

Menurut *World Bank* dalam (Mardiasmo, 2021) *good governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi investasi, dan pencegahan korupsi politik atau administrative, menjalankan disiplin anggaran, penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *United Nations Development Program* (UNDP) dalam (Mardiasmo, 2021) menyatakan bahwa *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif disemua tingkatan. Dari konsep ini, terdapat 3 pilar penting dari *good governance*, diantaranya yaitu:

- Economic governance* (kesejahteraan rakyat)
- Political governance* (proses pengambilan keputusan)
- Administratif governance* (tata laksana pelaksanaan kebijakan)

Sedangkan Menurut (Mardiasmo, 2021) terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas).

- Transparansi
- Partisipasi
- Akuntabilitas
- Value for Money* (ekonomis, efisiensi, efektifitas)

Menurut (Rachmawati et al., 2015) *Good Governance* bertujuan untuk menyelaraskan tujuan atau kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) perusahaan sehingga dapat meminimalkan konflik keagenan diantara mereka serta *good governance* juga dapat mengurangi praktek-praktek bisnis yang tidak sehat, sedangkan pada sektor publik penerapan *good governance* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan iklim daya saing, serta dapat mencegah terhadap tindakan korupsi.

2.4. Kesejahteraan Masyarakat

Sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan mereka disebut kesejahteraan. Namun, tingkatan kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif karena bergantung pada seberapa besar kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Pratama et al., 2012). Mengikuti rasa keselamatan, kesesuaian, dan ketentraman diri, rumah tangga, dan masyarakat lahir dan batin, material maupun spiritual memungkinkan setiap warga negara untuk berusaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat dengan mempertahankan hak asasi manusia (Wijayanti, 2013). Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012). Tentunya dalam kesejahteraan masyarakat akan berhubungan dan berdampak pada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial, menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam (Suud, 2006) didefinisikan sebagai keadaan sejahtera dari suatu masyarakat yang mencakup kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah upaya seseorang atau organisasi untuk memberikan kontribusi materi atau tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan keamanan masyarakat.

2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Purba et al., (2021) arti Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut: “Pembangunan manusia merupakan sebuah konsep yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Namun, ide dasar dari pembangunan manusia yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia”. Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Indeks Pembangunan Manusia (HDI) mengukur standar hidup, melek huruf pendidikan, dan harapan hidup untuk semua negara di seluruh dunia (Hardjanto, 2011). Indeks pembangunan manusia digunakan untuk

mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut ((BPS), 2023a), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) biasa digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Putra, 2018). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu proses memperbanyak pilihan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia atau mensejahterakan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dengan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan,

2.6. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah ((BPS), 2023b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu (setahun) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah.

2.7. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu pencatatan akuntansi dan juga merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi (Kasmir, 2018). Laporan keuangan, yang dibuat oleh akuntan pada akhir periode, terdiri dari neraca dan posisi keuangan serta pendapatan atau laba-rugi (Munawir, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.8. Opini Pemeriksaan

Opini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

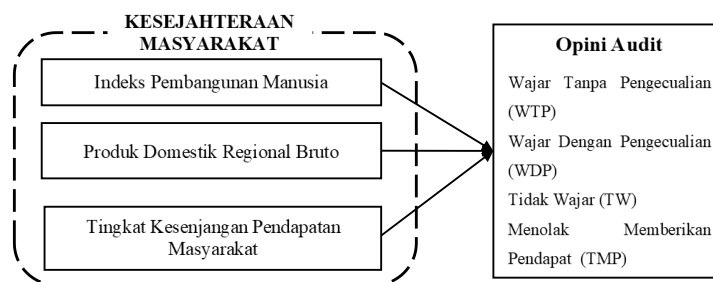
- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- Kepatuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- Efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jeni opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu:

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) – WTP
- Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*) – WDP
- Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*) – TW
- Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*) – TMP

2.9. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.10. Metode yang Digunakan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan data sekunder, dimana data kuantitatif merupakan metode penelitian dengan data berupa angka-angka dan dianalisis secara statistika (Sugiyono,

2012). Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data di website tentang indeks pembangunan manusia, pendapatan domestik regional bruto, tingkat kesenjangan pendapatan dan opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melakukan studi pustaka yang komprehensif tentang konsep kesejahteraan masyarakat, opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam konteks penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dan memahami penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder digunakan apabila penulis mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu laporan-laporan tabel data tahunan yang diterbitkan oleh website resmi pemerintah tentang indeks pembangunan manusia, pendapatan domestik regional bruto, tingkat kesenjangan pendapatan, dan opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Populasi dalam penelitian ini yaitu opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Wilayah Jawa Barat Periode 2019-2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan data 4 tahun dari tahun pengamatan yaitu tahun 2019-2022. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keseluruhan dari populasi dengan Teknik sampling jenuh, yaitu Teknik pengambilan sampel dengan penggunaan semua populasi menjadi sampel dikarenakan jumlah populasi yang relatif kecil untuk meminimalisir kesalahan. Kategori data dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan dari data *time series* dan *cross section* sehingga memungkinkan tersedianya data yang lebih banyak dan menghasilkan derajat kebebasan yang lebih besar. Atas hal tersebut, metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan model matematika dan statistik yang terklasifikasi dalam analisis data panel. Untuk mempermudah analisis data penulis menggunakan software EvIEWS versi 10. Perumusan analisis regresi data panel secara sistematis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon \quad (1)$$

Keterangan: Y=opini, α = Koefisien Konstanta, β_1 = Koefisien Regresi IPM, X_1 = Ukuran IPM β_2 = Koefisien Regresi PDRB per Kapita, X_2 = Ukuran PDRB per Kapita, β_3 = Koefisien Regresi GINI Rasio, X_3 = GINI Rasio, ϵ = Tingkat Kesalahan (*error*)

2.11 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek tau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pernyataan yang sudah dikemukakan oleh para ahli, syarat untuk menjadi sebuah variabel adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian, dapat diamati, dapat diukur, dan memiliki variasi. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini juga dapat disebut dengan variabel prediksi (*predictor*) atau variabel perangsang (*stimulus*). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, dan Tingkat Kesenjangan Masyarakat. Variabel dependen atau langsung merupakan variabel dependen atau langsung yang nilainya dipengaruhi oleh variasi variabel bebas. Variabel ini juga sering disebut dengan variabel prediksi (*predictand*) dan variabel tanggapan (*response*). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat. Berikut ini merupakan penjabaran secara jelas mengenai Definisi Operasionalisasi Variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2. Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi / Konsep	Indikator	Skala
Indeks Pembangunan Manusia (X_1)	IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). (BPS)	a. Umur panjang dan hidup sehat b. Pengetahuan Standar hidup layak	Rasio
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (X_2)	PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).(BPS)	Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu $PDRB \text{ Perkapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk}}$	Rasio
Tingkat Kesenjangan Masyarakat (X_3)	Tingkat kesenjangan masyarakat yang diukur dengan gini ratio adalah ukuran tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.	Koefisien gini yang didasari kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan pendapatan dengan persentase kumulatif kelompok $GR = 1 + \sum_{i=1}^n f_{pi}x (f_{ci} + f_{c_{i-1}})$	Rasio
Opini (Y)	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat	a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Interval

Variabel	Definisi / Konsep	Indikator	Skala
	kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (UU No. 15 Tahun 2004)	c. Tidak Wajar (TW) d. Menolak Memberikan Opini (TMP)	

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Descriptive Analysis

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Statistik Deskriptif

VALUE	IPM	PDRB	GINI	OPINI
Mean	71.97500	43338.52	0.370455	3.919643
Median	71.09000	33428.50	0.362000	4.000000
Maximum	82.50000	133378.0	0.489000	4.000000
Minimum	65.36000	19241.00	0.284000	3.000000
Std. Dev.	4.611556	26621.10	0.041661	0.273067
Skewness	0.772377	1.644479	0.487685	-3.087365
Kurtosis	2.807665	4.834846	2.941674	10.53182
Observations	112	112	112	112

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan, artinya semakin tinggi atau meningkatnya IPM suatu daerah mengindikasikan adanya peningkatan kualitas masyarakat atau sumber daya manusia di daerah tersebut. Oleh karenanya pembangunan manusia yang tinggi dan terampil sangat penting untuk mendorong terciptanya efisiensi pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut. Pembangunan manusia di Jawa Barat sendiri menunjukkan tren yang mengalami peningkatan tiap tahunnya, dengan adanya peningkatan kualitas IPM di Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan total output yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya. Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia tertinggi sebesar 72,570 yaitu pada tahun 2022, sebesar 82,500 untuk Kota Bandung, sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu sebesar 65,360 pada tahun 2020 yaitu Kabupaten Cianjur.

3.1.2. Pendapatan Domestik Regional Bruto

Nilai rata-rata Pendapatan domestik regional bruto pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan, artinya pertumbuhan ekonominya masih belum merata dan hanya berfokus pada daerah perkotaan. Periode tahun 2019-2022 menunjukkan nilai rata-rata Pendapatan domestik regional bruto tertinggi sebesar 46.578 yaitu pada tahun 2022, nilai Pendapatan domestik regional bruto maximum sebesar 133.378 untuk tahun 2022 yaitu pada Kota Bandung, sedangkan nilai Pendapatan domestik regional bruto terendah yaitu sebesar 20.002 pada tahun 2021 untuk Kabupaten Cianjur

3.1.3. Tingkat Kesenjangan

Nilai rata-rata Tingkat kesenjangan pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2022 menunjukkan adanya peningkatan dan di bawah 1, artinya tingkat kesenjangan yang merata. Dapat dilihat bahwa periode tahun 2019-2022 menunjukkan nilai rata-rata tingkat kesenjangan tertinggi sebesar 0,377 yaitu pada tahun 2022, nilai Tingkat kesenjangan maximum sebesar 0,489 untuk tahun 2021 yaitu pada Kota Cirebon artinya kenaikan tersebut menggambarkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat masih cukup besar, sedangkan nilai Tingkat kesenjangan terendah yaitu sebesar 0,284 pada tahun 2019 untuk Kota Indramayu.

3.1.4. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Data Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2022 sebagian besar mendapatkan nilai 4 artinya wajar tanpa pengecualian, kecuali untuk Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, dan Kota Bekasi mendapatkan nilai 3 artinya wajar dengan pengecualian, sehingga harus diperbaiki dan ditingkatkan.

3.2. Pengujian Model Data Panel

3.2.1. Uji Chow

Berdasarkan hasil pengujian data panel menggunakan uji *chow* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.771365	(27,81)	0.0261
Cross-section Chi-square	51.970264	27	0.0027

Nilai probabilitas *cross-section chi-square* sebesar 0,0245 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu ($0,0245 < 0,05$) maka hasil uji *chow* menolak H_0 . Artinya model menolak *common effect model* dan mengikuti *fixed effect model*. The average loyalty score is 3.117 and the standard deviation is 0.507, the category is quite high towards high, meaning that loyalty to BPJS Health in Greater Bandung can be said to be quite high, although continuous evaluation must be carried out to increase loyalty.

3.2.2. Uji Hausman

Berdasarkan hasil pengujian data panel menggunakan uji *hausman* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.495576	3	0.2127

Nilai probabilitas *cross-section chi-square random* sebesar 0,2127 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 yaitu ($0,2127 > 0,05$) maka hasil uji *hausman* menerima H_0 . Artinya model menolak *fixed effect model* dan mengikuti *random effect model*.

3.2.3. Uji Lagrange Multiplier Test

Berdasarkan hasil pengujian data panel menggunakan uji *lagrange multiplier* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

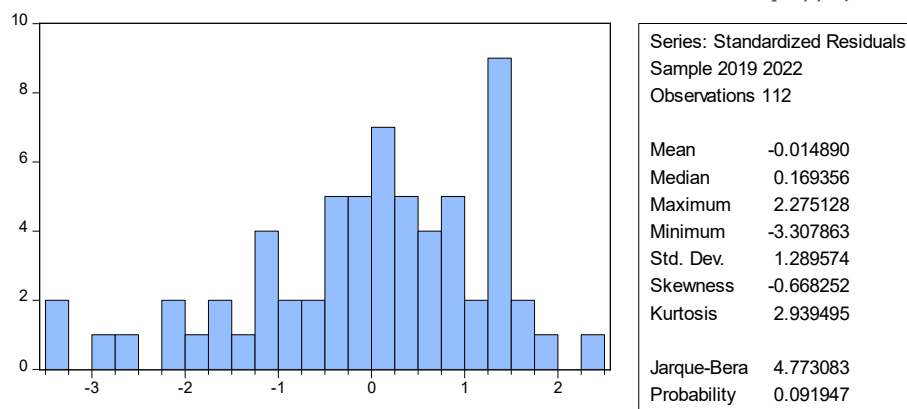
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	17.38001 (0.0000)	0.963536 (0.3263)	18.34355 (0.0000)
Honda	4.168934 (0.0000)	-0.981599 --	2.253786 (0.0121)
King-Wu	4.168934 (0.0000)	-0.981599 --	1.398787 (0.0809)
Standardized Honda	4.827549 (0.0000)	-0.763787 --	-0.408306 --
Standardized King-Wu	4.827549 (0.0000)	-0.763787 --	-1.154691 --
Gourieriou, et al.*	--	--	17.38001 (< 0.01)

Nilai *cross-section chi-square random* sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu ($0,0000 < 0,05$) maka hasil uji *lagrange multiplier* menolak H_0 . Artinya model menolak *common effect model* dan mengikuti *random effect model*. Dari ketiga pengujian untuk pemilihan model data panel menunjukkan bahwa model yang tepat untuk digunakan yaitu *random effect model*.

3.3. Uji Asumsi Klasik

3.3.1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji *Jarque Bera* diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.4 dapat dilihat nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 4,7730 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi berdistribusi normal, dimana sebaran data residual membentuk kurva distribusi normal.

3.3.2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 02/22/24 Time: 22:07			
Sample: 1 112			
Included observations: 112			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.199597	301.5333	NA
IPM	5.31E-05	417.6320	1.692260
PDRB	1.30E-12	5.062298	1.377803
GINI	0.576799	121.0838	1.498871

Hasil uji multikolineritas di atas dapat diketahui bahwa nilai *centered variance inflation factors* (VIF) menunjukkan nilai masing-masing variabel tidak lebih dari 10 atau < 10 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

3.3.3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *breusch pagan godfrey* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.621999	Prob. F (3,106)	0.6023
Obs*R-squared	1.902913	Prob. Chi-Square (3)	0.5928
Scaled explained SS	6.483563	Prob. Chi-Square (3)	0.0903

Nilai Obs*R-squared sebesar 0,5928 dan nilai probabilitas *chi-square* yaitu 0,0903 menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

3.3.4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Autokorelasi

R-squared	0.390785	Mean dependent var	1.363177
Adjusted R-squared	0.165149	S.D. dependent var	0.078557
S.E. of regression	0.071777	Akaike info criterion	-2.200978
Sum squared resid	0.417309	Schwarz criterion	-1.448536
Log likelihood	154.2548	Hannan-Quinn criter.	-1.895688
F-statistic	1.731930	Durbin-Watson stat	2.372689
Prob(F-statistic)	0.027221		

Nilai *Durbin-Watson* sebesar 2.372689. Nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi (n)= 112, jumlah variabel independen (k)=2 dan tingkat signifikansi 0,05 di dapat nilai dl=1.6669 dan nilai du=1,7352. Oleh karena nilai DW=2.372689 berada diatas nilai du=1,6669 namun dibawah nilai 4-du=2,359 yaitu (1,641<2,2648<2,372689), karena DW berada diantara nilai du dan 4-du (du<d<4-du) maka tidak terjadi autokorelasi positif.

3.4. Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis regresi data panel diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Regresi Data Panel

Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/22/24 Time: 21:52				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 28				
Total panel (balanced) observations: 112				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.288124	6.701912	0.042991	0.9658
IPM	1.310553	1.929919	0.679071	0.4990
PDRB	0.447781	0.207633	2.156594	0.0340
GINI	-0.191087	0.127301	-1.501063	0.1372

Model persamaan regresi berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.288124 + 1.310553 X_1 + 0.447781 X_2 - 0.191087X_3 + e$$

Dari model persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- Jika nilai konstanta sebesar 0.288124 artinya apabila variabel independen yaitu variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Tingkat Kesenjangan dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan bernilai sebesar 0.288124. Artinya, ketika belum ada perubahan pada nilai Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Tingkat Kesenjangan, maka nilai Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mengalami perubahan.
- Jika nilai koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan sebesar 1.310553, artinya apabila variabel Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel pendapatan domestik regional bruto dan Tingkat Kesenjangan dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1.310553. Tanda positif pada nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki arah pengaruh positif terhadap Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia maka semakin tinggi Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, begitupun sebaliknya.
- Jika nilai koefisien regresi variabel pendapatan domestik regional bruto menunjukkan sebesar 0.447781, artinya apabila variabel pendapatan domestik regional bruto mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kesenjangan dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.447781. Tanda positif pada nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa pendapatan domestik regional bruto memiliki arah pengaruh positif terhadap Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya semakin tinggi pendapatan domestik regional bruto maka semakin tinggi Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, begitupun sebaliknya.

Jika nilai koefisien regresi variabel tingkat kesenjangan menunjukkan sebesar -0.054966, artinya apabila variabel tingkat kesenjangan mengalami penurunan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan domestik regional bruto dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0.054966. Tanda negatif pada nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa Tingkat Kesenjangan memiliki arah yang negatif terhadap Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya semakin rendah tingkat kesenjangan maka Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik, begitupun sebaliknya.

3.5. Koefisien Determinasi

Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 11. Koefisien Determinasi

R-squared	0.390785	Mean dependent var	1.363177
Adjusted R-squared	0.165149	S.D. dependent var	0.078557
S.E. of regression	0.071777	Akaike info criterion	-2.200978
Sum squared resid	0.417309	Schwarz criterion	-1.448536
Log likelihood	154.2548	Hannan-Quinn criter.	-1.895688
F-statistic	1.731930	Durbin-Watson stat	2.372689
Prob(F-statistic)	0.027221		

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,3907 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Tingkat Kesenjangan dalam penelitian ini adalah sebesar 39,07%, sedangkan sisanya sebesar 60,93% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

3.6. Pengujian Hipotesis

3.6.1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (t-test)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 12. Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.288124	6.701912	0.042991	0.9658
IPM	1.310553	1.929919	0.679071	0.4990
PDRB	0.447781	0.207633	2.156594	0.0340
GINI	-0.191087	0.127301	-1.501063	0.1372

Hasil pengujian hipotesis secara parsial yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar $0.4990 > 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0.6790, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,981. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.6790 < 1,981$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak, artinya secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap variabel Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai probabilitas variabel pendapatan domestik regional bruto sebesar $0.0340 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.156594, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,981. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.156594 > 1,981$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, artinya secara parsial variabel pendapatan domestik regional bruto berpengaruh terhadap variabel Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai probabilitas variabel Tingkat Kesenjangan sebesar $0.1372 > 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -1.501063, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,981. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1.501063 < 1,981$, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak, artinya secara parsial variabel Tingkat Kesenjangan tidak berpengaruh negatif terhadap variabel Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.6.1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 13. Pengujian Hipotesis Secara Simultan

R-squared	0.364731	Mean dependent var	0.109455
Adjusted R-squared	0.185361	S.D. dependent var	3.290608
S.E. of regression	2.970015	Akaike info criterion	5.211727
Sum squared resid	749.7840	Schwarz criterion	5.825473
Log likelihood	-261.6450	Hannan-Quinn criter.	5.460666
F-statistic	2.733403	Durbin-Watson stat	2.745199
Prob(F-statistic)	0.009302		

Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,3647 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 2,733 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,69. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $2,733 > 2,69$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Tingkat Kesenjangan berpengaruh terhadap variabel Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.6.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan nilai probabilitas $0,4990 > 0,05$. Hal ini dimungkinkan karena secara umum pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan tanpa perlu melihat apakah masyarakat di daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan masyarakat yang tinggi atau rendah. Adapaun tujuan pemeriksaan LKPD yang tertuang dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu memberikan opini sesuai dengan tingkat kewajaran informasi yang disajikan LKPD. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Istiyanto, 2016b) yang menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap opini pemeriksaan atas LKPD.

3.6.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan bahwa pendapatan domestik regional bruto berpengaruh terhadap Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2019-2022 berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.0255 < 0,05$. Hal ini karena pendapatan domestik regional bruto berperan dalam pembangunan daerah sehingga dapat memberikan penilaian mengenai opini laporan keuangan daerah. Dengan pembangunan daerah yang baik ditandai dengan pendapatan masyarakat yang meningkat maka masyarakat tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar mereka dan lebih peduli terhadap pemerintahan mereka, sehingga pengawasan dari masyarakat akan meningkat dalam tata kelola keuangan pemerintah yang ditandai dengan opini laporan keuangan yang baik. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Surya & Suparno, 2019b) yang menunjukkan bahwa pendapatan domestik regional bruto berpengaruh terhadap opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.6.4 Pengaruh Tingkat Kesenjangan Pendapatan terhadap Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Tingkat Kesenjangan tidak berpengaruh terhadap Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,1372 > 0,05$, yang memiliki arti bahwa tingkat kesenjangan tidak cukup untuk mempengaruhi Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tinggi rendahnya tingkat kesenjangan tidak dapat memberikan pengaruh terhadap Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut karena adanya kemungkinan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK hanya terbatas kepada nilai pendapatan suatu daerah tersebut, tanpa adanya perhitungan mengenai tingkat pendapatan dari masyarakatnya tinggi atau rendah, merata atau tidak. Hal ini merujuk bahwa opini merupakan suatu pernyataan dari pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan didasari atas kriteria seperti adanya kesesuaian dengan SAP, cukup dalam pengungkapan, patuh terhadap undang-undang dan terwujudnya efektifitas sistem pengendalian intern sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Istiyanto, 2016b) yang menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan tidak berpengaruh terhadap opini pemeriksaan atas LKPD.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap opini atas hasil pemeriksaan LKPD dengan nilai probabilitas $0,4990 > 0,05$ karena secara umum pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan tanpa perlu melihat apakah masyarakat di daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan masyarakat yang diukur oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi atau rendah, hal tersebut sesuai dengan tujuan pemeriksaan LKPD yang tertuang dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu memberikan opini sesuai dengan tingkat kewajaran informasi yang disajikan LKPD. Tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap opini atas hasil pemeriksaan LKPD dimana nilai probabilitas sebesar $0.0255 < 0,05$ karena daerah dengan pendapatan domestik regional bruto per kapita yang tinggi menunjukan bahwa masyarakatnya memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, sehingga masyarakatnya tidak lagi berkutat dengan pemenuhan kebutuhan dasar, hal tersebut mendorong masyarakat berperan aktif, kritis dan independen dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerahnya sehingga tercipta tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik yang ditandai dengan pemberian opini yang baik atas daerahnya. Tingkat kesenjangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap opini atas hasil pemeriksaan LKPD nilai probabilitas sebesar $0,1372 > 0,05$, yang memiliki arti bahwa tingkat kesenjangan pendapatan tidak cukup untuk mempengaruhi Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

REFERENCES

- Adzani, A. H., & Martani, D. (2014). *Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidakpatuhan Regulasi terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Badrudin, R. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*.

- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 18(4), 452–469.
- (BPS), B. P. S. (2023a). *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik.
- (BPS), B. P. S. (2023b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2018-2022*. BPS RI.
- Efendi, Y. N., & Komarudin, A. (2014). Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat dan Stabilitas Politik terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 5(1), 1–29.
- Hamada, O., & Mahaswara, A. (2016). Menggugat Ruang Publik Melalui Gerakan Masyarakat (Studi Kasus Gerakan Warga Berdaya di Yogyakarta). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*.
- Hardjanto, I. (2011). *Teori Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Istiyanto, S. (2016a). Kerugian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 135–147.
- Istiyanto, S. (2016b). Kerugian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Opini Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 135–147.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi)*. PT Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Munawir, S. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (2nd ed.). Liberty.
- Pratama, D. S., Gumilar, I., & Maulina, I. (2012). Analisis pendapatan nelayan tradisional pancing ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 3(3).
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., & Rozaini, N. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Putra, W. (2018). *Perekonomian Indonesia: Penerapan Beberapa Teori Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmawati, Y., Susanto, D., & Yusuf, D. A. (2015). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, 12(2), 116060.
- Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public spending and outcomes: Does governance matter? *Journal of Development Economics*, 86(1), 96–111.
- Saebani, B. A. (2012). *Pengantar Antropologi*. CV Pustaka Setia.
- Simanjuntak, B. A. (2016). *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surya, J., & Suparno, S. (2019a). Pengaruh Peran Masyarakat Madani dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 259–269.
- Surya, J., & Suparno, S. (2019b). Pengaruh Peran Masyarakat Madani dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 259–269.
- Suud, M. (2006). *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial*.
- Taneko, S. B. (1984). *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*.
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457.
- Wijayanti, L. (2013). Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. *Agriekonomika*, 2(2), 139–152.